

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

UNIT KERJA : PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN : 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	205 Laporan	51 Laporan	51 Laporan	52 Laporan	51 Laporan	Desember 2026	Triwulan I: - Persiapan dan identifikasi penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Lampung yang masih tersisa di tahun sebelum tahun 2026 - Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang masuk di tahun 2026 di perwakilan Lampung Triwulan II: - Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Lampung Triwulan III: - Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Lampung	Tim PVL dan Tim Pemeriksaan Laporan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								Triwulan IV: - Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Lampung - Evaluasi dan penyusunan laporan Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Lampung	
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan			1 Laporan			Triwulan I: - Persiapan IAPS Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik - Penyusunan jadwal kegiatan dan identifikasi IAPS Triwulan II: - Koordinasi awal dengan instansi tempat IAPS Triwulan III: - Pelaksanaan IAPS Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	Tim Pemeriksaan Laporan dan IAPS Perwakilan

✓

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								Triwulan IV: - Evaluasi Pelaksanaan IAPS - Penyusunan Laporan IAPS	
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	16 Pemerintah Daerah	-	1 Pemerintah Daerah (6,25%)	11 Pemerintah Daerah (68,75%)	4 Pemerintah Daerah (25 %)	November 2026	Triwulan I: - Persiapan pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Triwulan II: - Penyusunan Jadwal pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di 16 Pemerintah Daerah - Koordinasi awal dengan instansi penyelenggaraan pelayanan publik di 16 Pemerintah Daerah - Pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di 1 Pemerintah Daerah Triwulan III: - Pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di 11 Pemerintah Daerah Triwulan IV: - Pelaksanaan opini pengawasan	Tim Pencegahan Maladministrasi

4

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								penyelenggaraan pelayanan publik di 4 Pemerintah Daerah - Evaluasi dan penyusunan laporan hasil Pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di 16 Pemerintah Daerah	
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan (25%)	1 Layanan (25%)	1 Layanan (25%)	1 Layanan (25%)		Triwulan I: - Persiapan dan identifikasi layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan II: - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan III: - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan IV:	Tim Sekretariat di Perwakilan

4

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								- Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor -Evaluasi dan penyusunan laporan Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG,



Nur Rakhman Yusuf